

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan kondisi perekonomian yang semakin pesat ini mengharuskan untuk sebuah negara melakukan hal yang lebih baik lagi terutama untuk Negara Indonesia agar dapat dipandang baik dimata dunia. Salah satunya yang harus dilakukan oleh Negara Indonesia yaitu membuat suatu penyusunan anggaran terhadap suatu kegiatan yang akan dilakukan.

Penyusunan anggaran yang dilakukan tidak lepas dari peranan pemerintah agar suatu kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan lembaga pemerintah untuk melakukan kegiatan tersebut. Negara Indonesia telah banyak membentuk lembaga-lembaga yang diantara memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Salah satunya yaitu lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang pekerjaan umum yang dinamakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia memiliki tugas sebagai berikut : perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaran jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan pemukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, system penyediaan air minum , sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan pembinaan jasa konstruksi; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan adminstrasi kepada seluruh

unsur organisasi di lingkungan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat; pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kegiatan operasi, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, dan membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat bagi suatu Negara, seperti pembayaran pajak yang meningkat, industri yang semakin berkembang dan peningkatan hasil pertanian dan perkebunan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia/Dinas pekerjaan umum juga membentuk beberapa instansi yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaannya dan memiliki tugas khusus dari masing-masing instansi tersebut. Salah satu instansi yang bergerak dalam bidang pekerjaan umum ini adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) memiliki peranan khusus untuk menjalankan kegiatan infrastruktur yang ada di seluruh wilayah Indonesia terutama di wilayah Sumatera Barat. Infrastruktur itu biasanya dibangun untuk bisa membantu dan mempermudah suatu kegiatan seperti transportasi, pendataan penduduk, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Sedangkan kegiatan infrastuktur yang di lakukan oleh dinas pengelolaan sumber daya air (psda) pada provinsi sumater barat sebagai berikut ; Pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; pembentukan wadah koordinasi sumberdaya air di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota; Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi

lintas kabupaten/kota; Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai dan pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 4,5 juta jiwa, yang perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian. Kegiatan infrastruktur yang terkait pertanian dilakukan oleh dinas pengelolaan sumber daya air (PSDA), kegiatan irigasilah yang menjadi objek yang perlu diperhatikan, dikarenakan kegiatan inilah yang menjadi peranan yang sangat penting bagi masyarakat terutama di wilayah sumatera barat untuk meningkatkan hasil produksi yang berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat nantinya. Untuk mencapai hasil tersebut diperlukannya kondisi jaringan irigasi yang optimal pada daerah-daerah irigasi yang menjadi lumbung padi Sumatera Barat untuk mengalirkan air dari intake (pengambilan) ke petak-petak tersier dan juga diperlukannya rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur jaringan irigasi agar fungsi bangunan dan saluran pada jaringan irigasi tersebut dapat bekerja optimal. Oleh sebab itu, kegiatan infrastruktur tersebut memerlukan pengeluaran biaya agar tujuan yang diharapkan berjalan dengan semestinya. Sebelum biaya tersebut dikeluarkan dinas psda harus pintar dalam menyingkapi biaya yang akan dikeluarkan dengan cara melakukan penyusunan anggaran, agar nantinya biaya yang dikeluarkan dapat terealisasi dengan baik dan tau kemana arah tujuan biaya tersebut dikeluarkan.

Selain itu, tidak hanya penyusunan anggaran yang menjadi peranan penting dalam hal ini melainkan penyerapan anggaran juga menjadi hal yang penting dalam mengukur kinerja instansi-instansi pemerintah dalam melakukan setiap kegiatan yang telah direncanakan. Melihat dari beberapa tahun lalu, kinerja instansi pemerintah

khususnya PSDA mengalami perbedaan dari masing-masing tahunnya, yang dilihat dari persentase penyerapan dana anggaran. Penyerapan anggaran, dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk menilai kinerja instansi pemerintahan, mengenai dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada instansi, apabila dana tersebut tidak digunakan secara efektif dan efisien maka akhirnya dapat berujung pada masalah dapat perencanaan kegiatan. Selain itu suatu penyerapan harus diikuti dengan pengendalian untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang biasa disebut dengan penyerapan anggaran.

Proses penyerapan anggaran melibatkan beberapa pihak, mulai dari manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. Apabila masing-masing manajemen dinas PSDA tersebut tidak dapat melakukan penyerapan anggaran kegiatan irigasi tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan maka akan berujung kepada kerugian. Pengambilan keputusan terhadap penyerapan anggaran terhadap kegiatan irigasi yang dilakukan oleh manajemen juga akan mengakibatkan penurunan hasil perekonomian masyarakat wilayah Sumatera Barat. Selain itu, apabila kurangnya pengendalian yang dilakukan oleh dinas PSDA terhadap setiap biaya yang dikeluarkan dan hanya mempercayakan kepada salah seorang saja untuk melakukan penyerapan biaya tersebut mengakibatkan tidak efisiennya biaya yang keluar dan juga kurangnya kemampuan manajemen memprediksi yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan itu semua akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan yang diharapkan.

Sistem kinerja irigasi yang kurang baik mengakibatkan kecenderungan aliran irigasi tidak berjalan dengan baik. Telah terjadinya pencatatan yang tidak berdasarkan

kepada standar akuntansi yang telah ditetapkan terkait pengeluaran biaya. Kurangnya melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan pengamatan terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan terhadap penyerapan anggaran, kurangnya memanfaatkan kegiatan yang menguntungkan bagi dinas psda, dan tidak memaksimalkan penyerapan anggaran terhadap pemanfaatan persediaan yang tersedia mengakibatkan kegagalan dalam proses penyusunan anggaran.

Berdasarkan masalah yang terlihat di atas, bahwa sangat pentingnya melakukan penganggaran terhadap dinas pengelola sumber daya air (PSDA). Dengan demikian, hal tersebut menarik penulis untuk melakukan praktek kerja lapangan/magang dan penelitian mengenai penyerapan anggaran pada dinas PSDA provinsi sumatera barat yang berjudul **“ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENCATATAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka untuk membatasi ruang lingkup dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyerapan anggaran kegiatan infrastruktur irigasi pada dinas psda provinsi sumatera barat terkait tahun 2014 dan tahun 2015?
2. Bagaimana pencatatan yang telah dilakukan oleh psda dibandingkan dengan pencatatan menurut standar akuntansi (SAK) yang telah ditetapkan terhadap

penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Dinas PSDA provinsi Sumatera Barat?

3. Apa saja faktor penyebab terjadinya perbedaan penerimaan anggaran pada tahun 2014 dan tahun 2015?
4. Apa saja masalah yang dihadapi terkait penyerapan anggaran pada TA 2014 dan 2015?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyerapan anggaran pada Dinas PSDA provinsi Sumatera Barat selama 4 tahun terakhir.
2. Untuk mengetahui pencatatan yang dilakukan oleh dinas PSDA provinsi Sumatera Barat dengan pencatatan menurut standar akuntansi (SAK) yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perbedaan penerimaan anggaran pada tahun 2014 dan tahun 2015
4. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi terkait penyerapan anggaran pada TA 2014 dan 2015

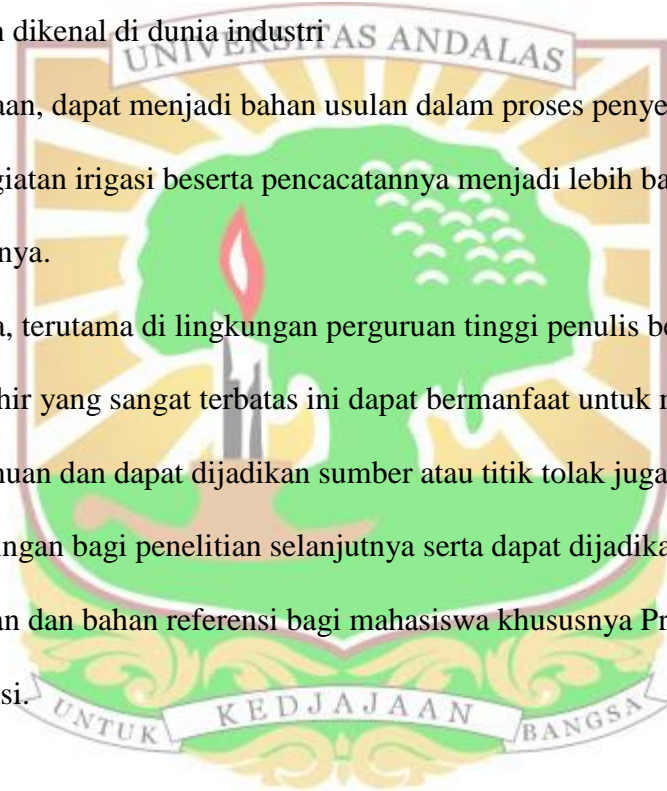
### **1.4 Manfaat Penulisan**

Hasil dari tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi :

1. Penulis, dapat meningkatkan keterampilan, menambah wawasan, meningkatkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliaan serta meningkatkan

keahlian dibidang praktek, memenuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswa DIII Akuntansi untuk mengikuti magang yang merupakan mata kuliah wajib pada Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, dan untuk menulis laporan tugas akhir sebagai prasyarat ujian kompre.

2. Universitas, dapat terjadilnnya kerjasama “bilateral” antara universitas dengan perusahaan, meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman kerja magang, dan akan dikenal di dunia industri
3. Perusahaan, dapat menjadi bahan usulan dalam proses penyerapan anggaran pada kegiatan irigasi beserta pencatatannya menjadi lebih baik untuk kedepannya.
4. Pembaca, terutama di lingkungan perguruan tinggi penulis berharap hasil tugas akhir yang sangat terbatas ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sumber atau titik tolak juga sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan bahan referensi bagi mahasiswa khususnya Program Studi Akuntansi.



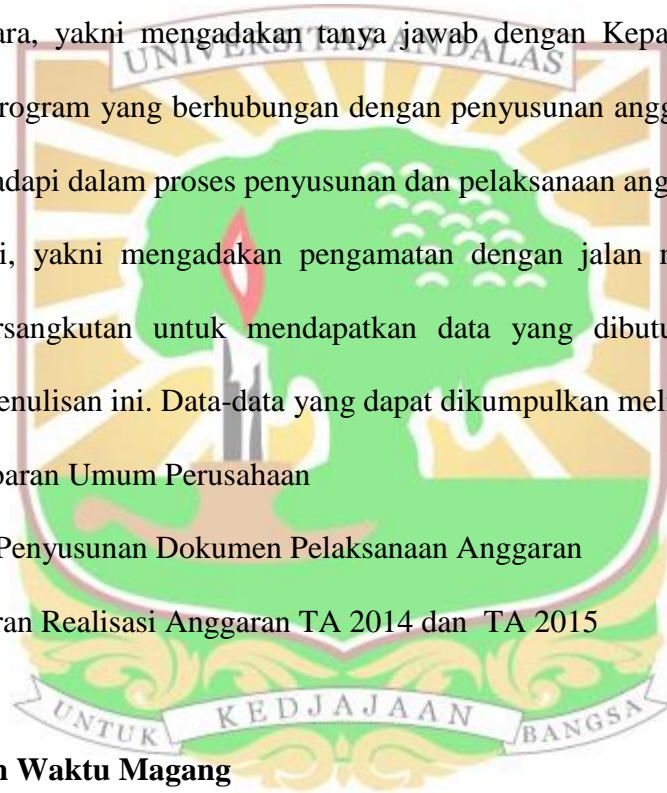
## 1.5 Metodologi

Dalam melakukan penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kepustakaan (Library Research) adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku atau literature serta tulisan-tulisan yang berhubungan anggaran sektor publik.

2. Lapangan (Field Research) adalah penelitian yang langsung dilakukan pada objek yang diteliti. Data dan informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan cara mengadakan wawancara terhadap pihak – pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam objek penelitian. Dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumbar melalui dua cara, yakni:

- a. Wawancara, yakni mengadakan tanya jawab dengan Kepala dan Staf Sub-Bagian Program yang berhubungan dengan penyusunan anggaran dan kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
- b. Observasi, yakni mengadakan pengamatan dengan jalan mendatangi objek yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sehubungan dengan penulisan ini. Data-data yang dapat dikumpulkan meliputi:
  1. Gambaran Umum Perusahaan
  2. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
  3. Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan TA 2015



### **1.6 Tempat dan Waktu Magang**

Adapun tempat magang yang digunakan untuk penelitian adalah pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat. Dengan waktu pelaksanaan selama 40 (empat puluh) hari kerja yakni mulai dari tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan selesai 26 Februari 2016.



## 1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab, kemudian diuraikan agar diketahui letak permasalahan yang dibicarakan dengan lebih mudah dan jelas. Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN :

Pada bab ini diuraikan secara umum latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang serta sistematika pembuatan laporan magang.

### BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan secara singkat tentang landasan teori yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikerjakan. Dalam hal ini, teori yang digunakan adalah, anggaran pemerintah, anggaran belanja infrastruktur, anggaran belanja infrastuktur irigasi, dan pencatatan belanja daerah dilihat dari sisi akuntansi dan menurut keuangan Negara.

### BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai sejarah singkat Dinas PSDA Provinsi Sumbar; visi dan misi; tugas pokok dan fungsi; tujuan dan ruang lingkup kegiatan; serta struktur organisasi pada Dinas PSDA Provinsi Sumbar.

### BAB IV URAIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

Bab ini menjelaskan tentang uraian dan pembahasan mengenai kajian atas penyerapan anggaran kegiatan irigasi dan membuat pencatatan pengeluaran yang benar secara akuntansi pada Dinas PSDA Sumatera Barat dari hasil kegiatan magang.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil peninjauan yang telah dilakukan tentang penyerapan anggaran kegiatan irigasi beserta pencatatan pengeluaran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan dan perubahan untuk masa yang akan datang.

